

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI DAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
SELASA, 7 JUNI 2011**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: --
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Raker)
Dengan	: Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Hari/Tanggal	: Selasa, 7 Juni 2011
Pukul	: 09.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat	: Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara	: Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2010
Kehadiran	: 37 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI 13 orang izin

HADIR :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| ◆ Ganjar Pranowo | ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH |
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH |
| ◆ Drs. H. Djufri | ◆ Zainun Ahmadi |
| ◆ Drs. H. Abdul Gafar Patappe | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Drs. Almuzzamil Yusuf |
| ◆ Drs. Ramadhan Pohan, MIS | ◆ TB. Soenmandjaja.SD |
| ◆ Sutjipto, SH.,M.Kn | ◆ Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ Drs. H. Fauzan Syai'e |
| ◆ Paula Sinjal, SH | ◆ H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH |
| ◆ Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum | ◆ Drs. H. Nu'man Abdul Hakim |
| ◆ Gede Pasek Suardika, SH.,MH | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc | ◆ Dra. Hj. Ida Fauziyah |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus | ◆ Mestariyany Habie, SH |
| ◆ Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd | ◆ Miryam S. Haryani, SE.,M.Si |
| ◆ Dra. Eddy Mihati, M,Si | |

IZIN :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ◆ H. Chairuman Harahap, SH.,MH | ◆ Arif Wibowo |
| ◆ Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Alexander Litaay |
| ◆ Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM | ◆ Agus Purnomo, S.IP |
| ◆ Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si | ◆ Aus Hidayat Nur |
| ◆ Dr. M. Idrus Marham | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Drs. Soewarno | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1. Arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri 2012 yakni :
 - Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional
 - Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
 - Memantapkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum
 - Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan
 - Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan
 - Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi
 - Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memperkuat fiskal daerah
 - Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya, serta
 - Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek kelembagaan, personil dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi.
2. Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 dialokasikan Rp15.436.739.600.000,- yang diperuntukkan untuk 13 Program. Meliputi Rupiah Murni sebesar Rp14.701.415.400.000,-, PNPB sebesar Rp31.340.200.000,- PHLN/PDN sebesar Rp703.984.000.000,-. Alokasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,4% dibanding Tahun 2011 sebesar Rp681.944.320.000,-
3. Kementerian Dalam Negeri memperoleh tambahan pagu indikatif 2012 sebesar Rp1.623.656.800.000,- untuk mendukung program pelaksanaan kegiatan Prioritas "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)", menjadi sebesar Rp17.060.396.400.000,- dengan komposisi Rupiah Murni sebesar Rp15.628.415.400.000,-, PNPB sebesar Rp31.340.200.000,-, dan PHLN/PDN sebesar Rp1.400.640.800.000,-.
4. Dua kegiatan prioritas Kementerian Dalam Negeri yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)" dan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu.

5. Rencana program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri 2012 yakni Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp187.421.800.000,-, Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp479.556.500.000,- Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp3.692.437.500.000,- Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebesar Rp131.570.000.000,- Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp86.304.623.000, Program Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp483.297.500.000,- Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp11.028.389.000.000,- Program Pendidikan Kepamongprajaan sebesar Rp318.042.100.000,- Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri sebesar Rp52.499.500.000,- Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri sebesar Rp243.295.320.000,- Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri sebesar Rp116.057.557.000,- Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebesar Rp55.337.500.000,- Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri sebesar Rp186.187.500.000-.
6. Usulan Tambahan Pagu Tahun 2012 untuk sarana dan prasarana fisik pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemendagri yakni pembangunan sarana dan prasarana Kampus IPDN di daerah Provinsi Papua, NTB, dan Kalimantan Barat) dengan total sebesar Rp700.000.000.000,- dan pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Pusat Kemendagri.
7. Terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester II tahun 2010, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)

1. Total alokasi anggaran BNPP Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp248.399.500.000,- yang berasal seluruhnya dari Rupiah Murni. Alokasi tersebut terdiri dari Pagu Mengikat sebesar Rp14.399.530.000,- dan Pagu Tidak Mengikat sebesar Rp233.999.970,-. Dari total anggaran BNPP sebesar Rp207.399.500.000,- dikelola BNPP Pusat dan sebesar Rp41.000.000.000 dialokasikan ke daerah (berbentuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
2. Rencana kerja BNPP Tahun 2012 terdiri dari 2 Program yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya BNPP dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp113.399.500.000 dan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp135.000.000.000,-.
3. Program Prioritas BNPP Tahun 2012 meliputi
 - Penegasan batas wilayah negara (darat, laut) dan peresmian Pos Lintas Batas (PLB) negara.
 - Penajaman program dan kegiatan prioritas di masing-masing kecamatan dan pulau-pulau terkecil terluar yang telah ditetapkan sebagai "lokasi prioritas".

- Pengintegrasian rencana kebutuhan pengelolaan/pembangunan batas wilayah negara dengan kawasan perbatasan antara pemerintah daerah dengan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas.
 - Dilibatkannya kalangan dunia usaha untuk mengelola kawasan perbatasan.
 - Pembangunan pos lintas batas negara, berifat internasional dan tradisional.
 - Pembangunan berbagai sarana dan prasarana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan negara mempergunakan anggaran tugas pembantuan BNPP.
4. Usulan kegiatan yang belum tertampung dalam Pagu Indikatif BNPP Tahun 2012 yakni tambahan sebesar Rp212.100.000.000,- untuk Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Perbatasan, Pembangunan Talud Penahan Gelombang, Dermaga, Gudang Logistik, Pembangunan/Renovasi Pasar Kecamatan, dan Peningkatan Infrastruktur Pemerintahan, serta Pengadaan Sarana Produksi.

Terkait hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2010, telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI dan tidak didapati adanya temuan BPK RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyampaikan paparannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas pencapaiannya yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas Hasil Pemeriksaan Tahun 2010, dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mempertahankan pencapaian tersebut. Namun demikian, Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK, yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.
2. Terhadap Pagu Indikatif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp17.060.396.400.000,-** (*Tujuh Belas Triliun Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), dan usulan tambahan pagu anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana IPDN di daerah (Provinsi Papua, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat) sebesar **Rp700.000.000.000,-** Komisi II DPR RI meminta untuk membuat Hasil Evaluasi Program sebelumnya, Rincian Anggaran dan Kegiatan secara detail, dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komisi II DPR RI, untuk selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.
3. Terkait Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan perhatian khusus pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan antara lain:
 - Peningkatan Kapasitas Aparatur Pamong Praja.
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.

- Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri.
 - Pembangunan kampus-kampus IPDN yang tersebar di beberapa daerah, dimana dengan disebarnya kampus IPDN ke beberapa daerah, hendaknya tidak justru mengurangi rasa persatuan dan kesatuan.
4. Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri sepakat untuk mengagendakan secara khusus pertemuan yang akan membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan Pengimplementasian e-KTP dan Pelaksanaan Program PNPM-MP.
 5. Terhadap Pagu Indikatif Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp248.399.500.000,- (Dua Ratus Empat Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan usulan tambahan anggaran sebesar Rp212.100.000.000,- (Dua Ratus Dua Belas Miliar Seratus Juta Rupiah), Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk membuat Rincian Anggaran dan Kegiatan secara detail untuk selanjutnya akan dibahas secara mendalam pada Rapat Dengar Pendapat yang akan datang.
 6. Terkait dengan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk menyampaikan rincian kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan program ini. Disamping itu, untuk menjaga efektifitas, transparansi, dan menghindari terjadinya tumpang tindih (*over-lapping*) dalam penganggarannya dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, Komisi II DPR RI mendorong BNPP untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar anggaran untuk program ini dikelola sepenuhnya oleh BNPP.

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**JAKARTA, 7 JUNI 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126**